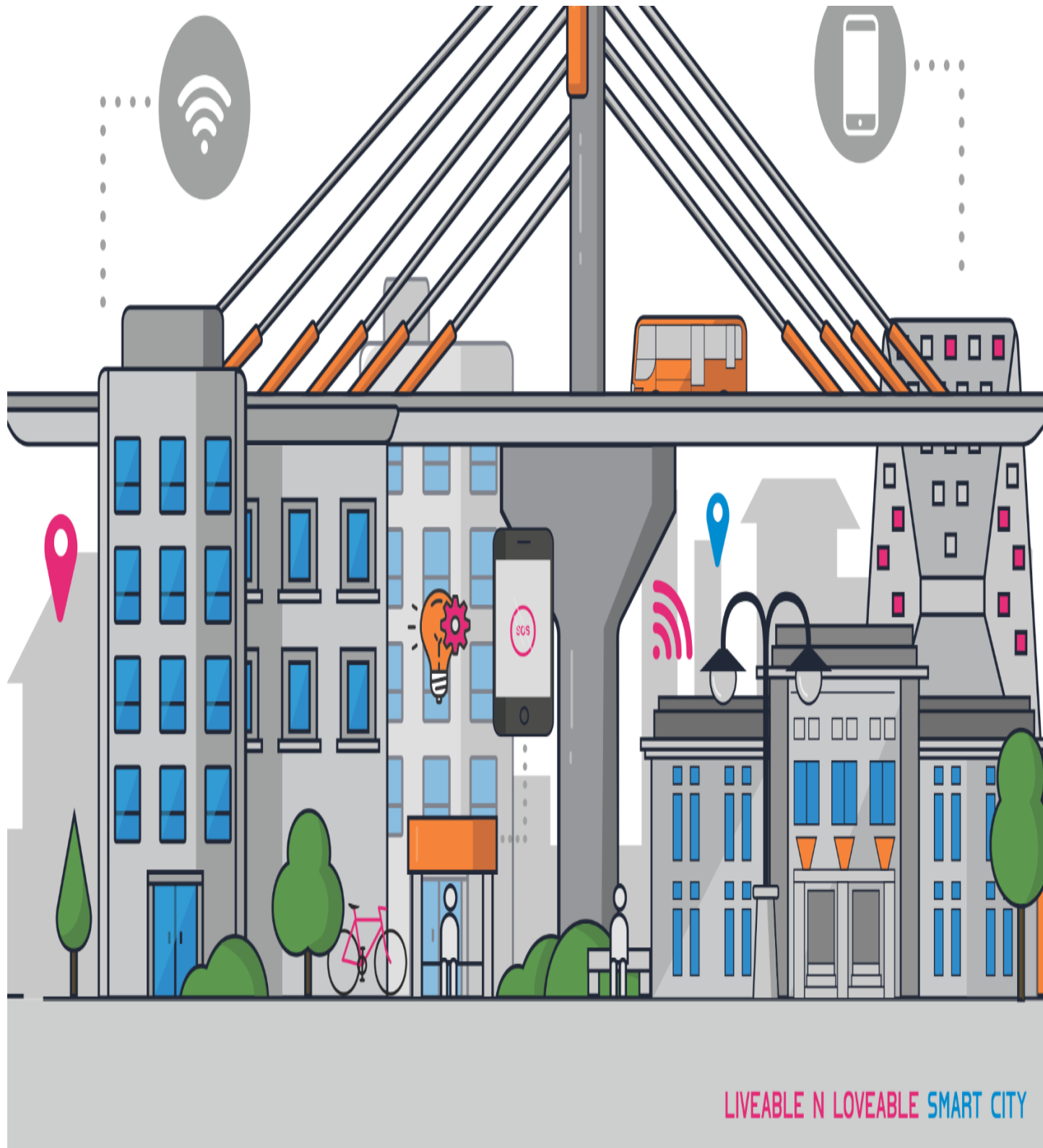


# RENCANA KERJA REVISI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2026



Jl. Wastukencana No.2 Bandung  
Tlp.022-4234892,email [diskominfo@bandung.go.id](mailto:diskominfo@bandung.go.id)

## KATA PENGANTAR

Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, khususnya dalam rencana tahunan. Disusunlah Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026. Penyusunan Rencana Kerja ini juga memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kota Bandung Tahun 2026.

Buku Rencana Kerja Tahunan ini diharapkan dapat menjadi acuan atau pedoman dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih berdaya guna dan berhasil guna, bertanggung jawab serta untuk lebih memanfaatkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.

Namun demikian kita menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan ini masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu disempurnakan. Oleh karena itu didalam implementasinya diharapkan bukan hanya mengacu kepada rencana tahunan ini, tetapi juga mampu berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pelayanan kepada masyarakat.

Bandung, 17 September 2025

**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika**



**(YAYAN AHMAD BRILYANA, S.Sos.M.Si)**  
Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 197311271993031003

## Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Lampiran Tabel	4
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Landasan Hukum	7
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	8
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2024</b>	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 dan Capaian Renstra.....	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	28
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika	32
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	33
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	43
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	44
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	4
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika	48
3.3 Program dan Kegiatan	50
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	55
<b>BAB V PENUTUP</b>	67

## Lampiran-lampiran Tabel dan Gambar

Halaman

Tabel 2.1 .....	15
Rekapitulasi Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2025 (tahun berjalan) Kota Bandung	
Tabel 2.2.....	30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung	
Tabel 2.3.....	34
Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2026 Kota Bandung	
Tabel 3.1.....	49
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 Sebelum Revisi	
Tabel 3.2.....	50
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 Sesudah Revisi	
Tabel 3.3.....	51
Tabel 4.1.....	58
Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kota Bandung	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Seiring dengan bergulirnya era globalisasi yang berlangsung cepat dan momentum implementasi kebijakan Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka telah terjadi perubahan yang signifikan, baik dalam tatanan maupun system Pemerintahan kita, terutama terlihat dalam perubahan paradigma, pemahaman konsep dan implementasi penyelenggaraan Pemerintahan.

Perubahan Undang-undang Otonomi Daerah dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mempertegas kembali bahwa penyelenggaraan Otonomi Daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Dalam rangka mendukung percepatan implementasi kebijakan Otonomi Daerah, peran serta setiap Instansi Pemerintah Daerah sangat penting dan akan sangat menentukan pelaksanaan Otonomi di daerah, sebab dalam rangka Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang sangat luas, untuk mengatur urusan rumah tangganya. Dengan demikian setiap organisasi Pemerintah Daerah harus melaksanakan teknis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah memegang peranan yang sangat strategis, yang harus dioptimalkan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pelaksanaan Otonomi Daerah saat ini telah memberi peluang pada Pemerintah Kota Bandung untuk melaksanakan berbagai kewenangan yang lebih luas dalam rangka mengurus rumah tangga daerah. Pada saat yang

sama masyarakat pun diberi peluang yang lebih besar untuk mengembangkan aspirasi dan prakarsanya dalam rangka pembangunan daerah.

Disamping itu pula penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan pada amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pada Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yakni: Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Pada Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa perangkat daerah harus menyusun Renstra, Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Berdasarkan Pasal 126 Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Selanjutnya Rencana Kerja yang disusun menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA). Setelah anggaran ditetapkan melalui mekanisme pembahasan antara pemerintah dengan DPRD (menjadi dokumen pelaksanaan anggaran/ DPA), maka instansi pemerintah membuat rencana operasional, dan selanjutnya membuat perjanjian kinerja (Penetapan Kinerja) dengan atasan langsungnya, di mana penetapan kinerja ini akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi kinerja. Pada akhir periode dilakukan pengukuran kinerja untuk selanjutnya dilaporkan dalam Laporan Kinerja Tahunan Instansi Pemerintah (LKIP).

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai lembaga staf dan *advisory* adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah yang melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di Bidang Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian, berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. Selain itu berfungsi melaksanakan perumusan kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian; yang meliputi; Perencanaan komunikasi, diseminasi informasi, teknologi informasi, Persandian (Keamanan Aplikasi); melaksanakan pelayanan teknis

administrasi Dinas; dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2026 berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

- cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
  7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 470);
  8. Peraturan Menteri PAN-RB No.59 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE;
  9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

### **1.3 Maksud Dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2026 adalah dalam rangka melaksanakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Tujuan penyusunan Rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2026 adalah :

- 1) Menyajikan capaian kinerja pelayanan tahun lalu sebagai dasar penyusunan rencana Tahun 2026;
- 2) Menyajikan isu strategis, tujuan dan sasaran perangkat daerah sebagai fokus pelayanan yang akan diwujudkan dan dikedepankan;
- 3) Menjadikan tolok ukur penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 4) Sebagai acuan dalam menyusun rencana anggaran berbasis kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2026.

- 5) Sebagai panduan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai sasaran.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2025 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### *BAB I Pendahuluan*

Menguraikan tentang Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, latar belakang, landasan hukum penyusunan, Maksud dan tujuan dan sistematika penyusunan RENJA.

### *BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024*

Menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD, Analisis Kinerja Pelayanan PD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

### *BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah*

Menguraikan tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja PD

### *Bab IV Rencana Kerja dan pendanaan Perangkat Daerah*

Menguraikan rencana kerja dan pendanaannya perangkat daerah dan perkiraan maju

### *BAB V Penutup*

Berisi kesimpulan dari Rencana Kerja tahunan



# BAB II

## HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung pada Tahun 2024 telah melaksanakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yaitu Bidang Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian. Terhadap urusan tersebut akan evaluasi sebagai berikut;

#### Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

#### A. PROGRAM: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
  - a. Sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah, sub kegiatan ini sebesar Rp. 135.213.540,- terealisasi Rp. 133.505.250,- (98,74%);  
de
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, sub kegiatan ini sebesar Rp. 17.178.808.918,- terealisasi sebesar Rp.16.414.134.333,- (95,55%);
2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah
  - a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas berserta atribut dan kelengkapannya, Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 183.589.870,- terealisasi sebesar Rp. 181.596.000,- (98,91%);
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 578.576.702,- terealisasi sebesar Rp. 571.810.050,- (98,83%);
  - b. Sub Kegiatan Penyediaan Perakatan Rumah Tangga, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 151.887.294,- terealisasi sebesar Rp. 150.887.295,- (99,34%);
  - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 159.090.622,- terealisasi sebesar Rp. 158.639.325,- (99,72%);
  - d. Sub Kegiatan Barang Cetak dan 95.081.517,- terealisasi sebesar Rp. 92.198.550,- (96,97%);
  - e. Sub Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 126.108.960,- terealisasi sebesar Rp. 126.108.960,- (100%);
  - f. Sub Kegiatan Fasilitas 327.962.500,- terealisasi sebesar Rp. 316.066.200,- (96,37%);
  - g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 469.738.000,- terealisasi sebesar Rp. 465.569.500,- (99,11%).
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 32.705.000,- terealisasi sebesar Rp. 30.439.049,- (93,01%)
  - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.824.802.128,- terealisasi sebesar Rp. 1.804.891.128,- (98,91%).
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 895.044.100,- terealisasi sebesar Rp. 781.840.000,- (87,35%);
  - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Sub

Kegiatan ini 177.458.986,- (89.09%);

- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 300.789.396,- terealisasi sebesar Rp. 297.320.210,- (98,85%).

**B. PROGRAM: PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**

1. Kegiatan Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, ada 4 sub kegiatan, yaitu;
  - a. Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik, Sub Kegiatan ini dengan pagu sebesar Rp. 857.610.000,- terealisasi sebesar Rp. 841.974.039,- (98,18%);
  - b. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 662.022.100,- terealisasi sebesar Rp. 661.185.000,- (99,87%);
  - c. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.976.313.906,- terealisasi sebesar Rp. 1.973.858.460,- (98,88%);
  - d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas, Sub Kegiatan ini dengan pagu sebesar Rp. 1.444.272.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.440.012.275,- (99,71%).

**C. PROGRAM : PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**

1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu;
  - a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.261.148.429,- terealisasi sebesar Rp. 2.164.517.481,- (95,73%).
2. Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, , yaitu;

- a. Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.344.432.624,- terealisasi sebesar Rp. 4.322.770.183,- (99,50%);
- b. Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 313.428.000,- terealisasi sebesar Rp. 313.171.300,- (99,92%);
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi data dan Informasi Elektronik, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 343.239.500,- terealisasi sebesar Rp. 342.976.600,- (99,92%);
- d. Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.308.707.720,- terealisasi sebesar Rp. 1.277.857.680,- (97,64%);
- e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.330.507.500,- terealisasi sebesar Rp. 2.175.979.918,- (93,37%);
- f. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas, Sub kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 454.842.400,- terealisasi sebesar Rp. 454.700.400,- (99,97%);
- g. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 298.777.600,- terealisasi sebesar Rp. 298.549.700,- (99,92%).

#### **D. PROGRAM : PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**

1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu;

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik, Sub Kegiatan ini dengan pagu

- anggaran sebesar Rp. 684.924.100,- terealisasi sebesar Rp. 684.521.389,- (99,94%);
- b. Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 284.310.000,- terealisasi sebesar Rp. 282.865.130,- (99,49%);
  - c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektorat di Daerah, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 486.127.360,- terealisasi sebesar Rp. 486.111.750,- (99,99%).

**E. PROGRAM : PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**

1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan, yaitu;
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Daerah, Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 794.201.700,- terealisasi sebesar Rp. 739.893.843,- (93,16%).

Dari hasil kinerja program dan kegiatan yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 sesuai dengan target yang telah ditentukan, terutama untuk mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Diskominfo.

Untuk lebih jelas dalam evaluasi pelaksanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini;

**Tabel 2.1**

**Rekapitulasi Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2025 (tahun berjalan) Kota Bandung**

**Dinas Komunikasi dan Informatika**

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )/Kegiatan ( <i>Output</i> )	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2024 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2025( n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan			
					Target Renja PD tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja PD tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
2	16											
2	16	03		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	4,77	4,59	4,77	4,77	100%	4,77	4,59	97,00

						<b>Nilai Penerapan SPBE lingkup Aplikasi</b>	10,00	45.45	36,0	45.45	<b>127,00</b>	10,00	45.45	<b>455,00</b>
						<b>Nilai Penerapan SPBE lingkup Perencanaan, Eevaluasi dan Pengembangan</b>	16,20	31.50	22,30	31.50	<b>142,00</b>	16,20	31.50	<b>194,45</b>
						<b>Nilai Penerapan SPBE lingkup Infrastruktur</b>	10,00	7.40	4,50	7.40	<b>123,40</b>	10,00	31,30	<b>313,00</b>
2	16	03	2,01		<b>Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota</b>	<b>Jumlah Sub Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota</b>	3	1	1	1	100	1	3,00	100,00
2	16	03	2,01	03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	- Jumlah lokasi dilengkapi wifi dan atau CCTV serta Jumlah interkoneksi antar Perangkat Daerah/Sekolah/puskemas	200	200	200	200	100	200	200	100,00
2	16	03	2,02		<b>Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Sub Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	7	7	7	7	100	7	7	100,00
2	16	03	2,02	01	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan	- Jumlah server yang terintegrasi di Pemerintah Kota Bandung	34	34	34	34	100	34	34	100,00



2	20	02.2	01		<b>Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100</b>	<b>3</b>	<b>12,00</b>	<b>80,00</b>
2	20	02.2	01	01	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	- Jumlah publikasi data dan infografis	3	1	1	1	100	1	2,00	66,67
2	20	02.2	01	02	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	- Jumlah Data Terbuka Terstandar	3	1	1	1	100	1	2,00	66,67
2	20	02.2	01	06	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	- Jumlah Dokumen Statistik Sektoral	3	1	1	1	100	1	2,00	66,67
<b>2</b>	<b>21</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>									
2	21	02			<b>Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</b>	Nilai Penerapan SPBE lingkup Persandian	1,37	<b>1,30</b>	<b>1,30</b>	<b>1,30</b>	<b>100,00</b>	1,37	<b>1,30</b>	<b>94,89</b>
<b>2</b>	<b>21</b>	<b>02.2</b>	<b>01</b>		<b>Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah aplikasi yang terkendali keamanannya</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>142,86</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>80,96</b>
2	21	02.2	01	04	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan Keamanan Informasi	21	10	7	10	142,86	7	10	80,96

2	16				<b>URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>									
2	16	01			<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>
2	16	01.2	01		<b>Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>
2	16	01.2	01	07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah layanan data/informasi Program/kegiatan Diskominfo	3	1	1	1	100	1	2,00	66,67
2	16	01.2	05		<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>
2	16	01.2	05	02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	3	1	1	1	100	1	2,00	66,67
2	16	01.2	06		<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>
2	16	01.2	06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah laporan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor terdida	36	12	12	12	100	12	12.	66,67
2	16	01.2	06	03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah tangga	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	36	12	12	12	100	12	12.	66,67

2	16	01.2	06	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK dan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	36	12	12	12	100	-	12.	<b>66,67</b>
2	16	01.2	06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6	2	2	2	100	2	2	<b>66,67</b>
2	16	01.2	06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	36	12	12	12	100	12	12.	<b>66,67</b>
2	16	01.2	06	08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	- Jumlah Laporan bulanan Penyediaan Makanan Dan Minuman Tamu	36	12	12	12	100	12	12.	<b>66,67</b>
2	16	01.2	06	09	Sub Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah Laporan bulanan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	36	12	12	12	100	12	12.	<b>66,67</b>
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>01.2</b>	<b>08</b>		<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>
2	16	01.2	08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	36	12	12	12	100	12	12.	<b>66,67</b>
2	16	01.2	08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan jasa pelayanan umum kantor	36	12	12	12	100	12	12.	<b>66,67</b>
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>01.2</b>	<b>09</b>		<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>

2	16	01.2	09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa pemeliharaan dan Perijinannya	29	29	36	12	100	29	29	100
2	16	01.2	09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah unit perbaikan peralatan kantor	36	12	12	12	100	12	12.	<b>66,67</b>
2	16	01.2	09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara	3	1	1	1	100		1	33,34
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>02</b>			<b>Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</b>	Nilai Penerapan SPBE lingkup Layanan Informasi	3,0	2,00	2,40	3,0	<b>100,00</b>	3,0	<b>3,0</b>	<b>100.00</b>
						Cakupan pengaduan masyarakat melalui LAPOR yang ditindaklanjuti	100%	99,43	100	98,33	<b>98,33</b>	100%	<b>99,62</b>	<b>99,62</b>
						Nilai layanan informasi masyarakat melalui radio	0,4	0,5	0,4	0,4	<b>100,00</b>	0,4	<b>0,4</b>	<b>100</b>
						Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Radio Sonata	88,60	82,35	88,40	88,51	<b>100,13</b>	88,50	<b>88,55</b>	<b>100.06</b>
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>02</b>	<b>01</b>		<b>Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah sub kegiatan pengelolaan dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>66,67</b>
2	16	02	01	02	Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	- Jumlah layanan penyuluhan dan pengendalian informasi	9	3	3	3	100	3	6	<b>66,67</b>

2	16	02	01	05	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik - Jumlah Studio Radio yang dikelola	6	2	2	2	100	2	4	<b>66,67</b>
2	16	02	01	06	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik - Jumlah layanan informasi publik	12	4	4	4	100	4	8	<b>66,67</b>
2	16	02	01	12	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas - Jumlah sosialisasi dan pembinaan kepada Masyarakat, Mitra dan Relawan	12	4	4	4	100	4	8	<b>66,67</b>

Sumber : Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

Dari uraian dan tabel yang disajikan di atas, ada hambatan dan solusi yang dapat menjadi bahan acuan untuk pelaksanaan kinerja tahun selanjutnya, yaitu;

#### 1 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK,

**Dukungan :** Koordinasi dengan Pewarta Balaikota Bandung (PBB), media daring dan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung memudahkan penyampaian informasi/klarifikasi/sosialisasi dan edukasi pada Program Bandung Menjawab menjadi lebih akurat karena informasi diperoleh langsung dari OPD terkait.

Selain itu, kami juga melakukan sosialisasi terkait layanan keterbukaan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), diantaranya melalui media cetak, media elektronik (website PPID), dan media sosial PPID Kota Bandung.

Saat ini, permohonan informasi Pemerintah Kota Bandung juga dilakukan secara digital dan satu pintu, yaitu melalui Aplikasi Permohonan Informasi Publik (SIMONIK/ <https://ppid-simonik.bandung.go.id/>). Hal ini juga diperkuat oleh koordinasi antara Diskominfo selaku PPID Utama dengan 77 PPID Pembantu yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah baik dinas, badan, bagian, kecamatan, BLUD, dan BUMD, serta 347 PPID Sub Pembantu Satker Pendidikan dari tingkat SMP Negeri hingga tingkat SD Negeri di Kota Bandung. Koordinasi yang kuat antar PPID Pembantu, dan PPID Sub Pembantu satker Pendidikan membuat penyelenggaraan pelayanan informasi publik dapat berjalan sesuai SOP, dan setiap tahun melakukan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik, menyiapkan desk layanan informasi di Mall Pelayanan Publik, serta melakukan monitoring dan evaluasi bagi PPID Pembantu dan Sub Pembantu Satker Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Koordinasi dengan OPD, lembaga dan organisasi lainnya berkaitan dengan isu hangat yang terjadi di Kota Bandung.

Sementara itu dari segi layanan keterbukaan informasi publik melalui PPID perlu dilakukan penguatan teknis SDM dalam penggunaan layanan

SIMONIK, serta pengembangan Aplikasi Permohonan Informasi Publik (SIMONIK) itu sendiri. Serta sosialisasi keterbukaan informasi public kepada masyarakat Kota Bandung.

Sementara itu untuk layanan keterbukaan informasi publik diperlukan adanya Bimbingan Teknis dan sosialisasi terkait layanan keterbukaan informasi publik bagi PPID Pembantu dan Sub Pembantu Satker Pendidikan serta warga Kota Bandung, serta pengembangan Aplikasi Permohonan Informasi Publik (SIMONIK) untuk memaksimalkan pemanfaatan aplikasi tersebut.

Koordinasi dengan admin LAPOR! pada instansi di Pemerintah Kota Bandung membuat pengaduan masyarakat yang masuk dapat ditangani dengan cepat dan tepat sesuai dengan SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat.

**Hambatan** : Sarana dan prasaran yang kurang memadai, sehubungan dengan lokasi Bandung Menjawab selalu berpindah. Ada kalanya narasumber yang hadir bukan pucuk pimpinan dan pengambil keputusan.

Mutasi dan Rotasi pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung membuat sering terjadinya perubah admin yang bertugas menindaklanjuti pengaduan sehingga sering terjadinya keterlambatan dalam menindaklanjuti pengaduan dikarenakan diperlukannya pelatihan kepada admin yang baru.

**Solusi** : Melengkapi sarana dan prasana pendukung Bandung Menjawab seperti penguatan jarinagn internet (kaitan streaming), alat-alat broadcast dan lainnya. Diharapkan narasumber yang hadir adalah pengambil keputusan sehingga informasi yang disampaikan tepat waktu.

Untuk pengelolaan pengaduan diperlukan bimbingan teknis secara rutin kepada para admin yang bertugas menindaklanjuti pengaduan juga diperlukannya sosialisasi secara masif kepada masyarakat baik melalui media sosial, meida cetak, media elektronik, sosialisasi melalui tatap muka, media luar ruang (seperti cetak spanduk, x-banner dan baliho).

## 2 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA

### **a. Lingkup Aplikasi**

#### **Pendukung :**

Regulasi, Manajemen & Tata Kelola yang baik sesuai peraturan yang berlaku, serta dukungan dari pimpinan, SDM dan infrastruktur.

#### **Hambatan :**

1. Masih adanya regulasi yang harus ditetapkan untuk mendukung implementasi aplikasi layanan publik maupun layanan Administrasi
2. Tingkat kepatuhan Perangkat Daerah terhadap peraturan yang berlaku perlu ditingkatkan.
3. Dukungan dari Perangkat Daerah perlu ditingkatkan.

#### **Solusi :**

1. Menyusun draft peraturan perundangan
2. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi.
3. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah.

### **b. Lingkup Perencanaan**

#### **Dukungan :**

Kebijakan Berupa Peraturan Walikota tentang Kebijakan Internal SPBE ,  
Arsitektur, Peta rencana dan manajemen

#### **Hambatan :**

1. Keterbatasan Anggaran Kegiatan
2. Keterbatasan waktu dan sumber daya manusia untuk memenuhi semua tingkat manajemen SPBE

#### **Solusi :**

1. Pemenuhan Anggaran kegiatan untuk mendukung Kebijakan, tata kelola dan manajemen SPBE
2. Memulai persiapan lebih awal terkait koordinasi dan konsolidasi penyusunan kebijakan internal SPBE, Tatakelola dan Manajemen SPBE
3. Menambah jumlah SDM untuk manajemen SPBE

### c. Lingkup Infrastruktur

#### **Hambatan :**

1. Berkurangnya alokasi layanan bandwidth OPD sehingga layanan Jaringan Intra Pemerintah (JIP) kota Bandung berjalan kurang optimal.
2. Sumber daya TIK (storage server, processor, memori) yang tersedia semakin sedikit karena adanya pengembangan aplikasi-aplikasi yang semakin besar.
3. Perangkat pendukung keamanan sistem informasi yang belum memadai untuk mendeteksi dan melindungi server dan aplikasi dari serangan siber.

#### **Solusi :**

Melakukan peningkatan kapasitas bandwidth untuk akses internet perangkat daerah dalam rangka optimalisasi manajemen dan monitoring bandwidth perangkat daerah serta Jaringan Intra Pemerintah (JIP) kota Bandung. Melaksanakan kajian cellplan menara telekomunikasi serta telah tersusunnya dokumen manajemen aset TIK yang lengkap dan terstruktur. Melengkapi sistem proteksi server dengan perangkat firewall dengan spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya TIK server (storage, processor, memori), dilakukan pemanfaatan Pusat Data Nasional dari Kemenkominfo, dan Server dari Diskominfo Provinsi Jawa Barat

### 3 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

**Hambatan :** Telah dilakukan beberapa langkah dalam peningkatan manajemen data dan layanan data diantaranya dengan pengembangan aplikasi Pengelolaan Data Terstandar dan Terintegrasi (SIPEDASI) dan pelaksanaan Bimbingan teknis bagi para pengelola data. Namun berdasarkan hasil evaluasi, keterbatasan sumber daya di Perangkat Daerah mengakibatkan tumpang tindihnya beban kerja sehingga mempengaruhi proses penyelesaian pelaksanaan kegiatan.

**Solusi** : Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya pada Perangkat Daerah.

#### 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Dukungan :

- a) Telah diraihinya sertifikasi ISO 27001 terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi;
- b) Telah dilakukan audit keamanan SPBE;
- c) Terjalannya kerjasama dan koordinasi yang baik dengan Diskominfo Provinsi Jawa Barat dan BSSN.
- d) Meningkatkan perlindungan data dengan instalasi Sandi Data oleh BSSN.
- e) Verifikasi Indeks KAMI oleh BSSN.

Permasalahan:

- a) Jumlah SDM TIK untuk pengembangan sistem informasi masih kurang.
- b) Secara kelembagaan, perlu adanya unit kerja khusus untuk pengembangan sistem informasi.
- c) Integrasi Sistem Informasi dan berbagi pakai data dengan lembaga vertikal masih terkendala di dalam pemanfaatan platform Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) dikarenakan belum semua lembaga vertikal menggunakan layanan SPLP ini.
- d) Untuk internal Kota Bandung, belum semua perangkat daerah memahami dan bisa memanfaatkan layanan SPLP ini dikarenakan SDM kurang .
- e) Kurangnya SDM yang kapasitas dan kompetensinya memadai dalam lingkup persandian dan keamanan informasi;
- f) Pengelolaan SMKI belum optimal
- g) Pengelolaan Tim Tanggap Insiden Siber berikut tools (SIEM dan SOC) belum optimal
- h) Belum tersedianya tools/alat sensor keamanan informasi.

Solusi :

- a. Menambah jumlah dan meningkatkan kompetensi SDM TIK untuk pengembangan sistem informasi.
- b. Membentuk unit kerja khusus yang mengurus pengembangan sistem informasi.
- c. Mendorong kementerian Komdigi untuk lebih proaktif mensosialisasikan pemanfaatan SPLP ke lembaga-lembaga vertikal.
- d. Mengadakan bimbingan teknis dan pendampingan terhadap perangkat daerah yang kesulitan dalam memanfaatkan layanan SPLP ini sebagai wadah berbagi pakai data dan integrasi Sistem Informasi.
- e. Sudah mengajukan formasi untuk Jabatan Fungsional Sandiman dan Manggala Informatika untuk pemenuhan SDM lingkup persandian dan keamanan informasi. Mengikuti bimtek/ pelatihan dari BSSN dan Konsultan Merekrut tenaga ahli/ konsultan perorangan yang berkompeten di bidang keamanan sistem informasi. Dan pada tahun 2024 ini menambah tenaga pranata komputer dari P3K sebanyak 2 orang untuk ditempatkan pada Seksi Persandian dan Keamanan Sistem Informasi.
- f. Mengadakan pendampingan ISO 27001 dan Indeks KAMI guna meningkatkan sistem manajemen keamanan informasi
- g. Melakukan asistensi dan bimtek dengan BSSN terkait pemanfaatan SIEM dan juga bimbingan teknis pengelolaan tim tanggap insiden siber dan mengoptimalkan tools yang ada.
- h. Penambahan anggaran untuk pembelian firewall guna mendukung sarana dan prasarana keamanan informasi pada tahun 2024

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika**

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator

kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Analisis kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung yang tercantum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan target. Ada 2 indikator Indikator Kinerja Utama, Pada Tahun 2024 dari 2 indikator ini ada 1 indikator yang melebihi target yaitu; Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); 2. indikator yang sesuai target yaitu; Prosentase data yang disampaikan kepada masyarakat secara terbuka; Prosentase Perangkat Daerah yang menggunakan persandian yang terkendali dan Indeks Kepuasan Masyarakat.

Untuk Tahun 2026 dari target 2 indikator ini diharapkan dapat terealisasi sesuai dengan target, sedangkan proyeksi tahun 2026 yang merupakan akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPD) diproyeksikan juga optimis dapat terealisasi dengan baik.

Analisis Indikator Kinerja Kunci Kota Bandung yaitu ada 8 indikator yang terdiri dari 3 urusan, yaitu;

1. Urusan Komunikasi dan Informatika ada 5 indikator, namun sesuai dengan urusannya Dinas Komunikasi dan Informatika hanya memiliki kewenangan 1 indikator saja yaitu Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat kecamatan, sedangkan 4 indikator lagi kewenangannya ada pada Kantor BPS Kota Bandung.

Pada tahun 2019 BPS Kota Bandung tidak mensurvei sesuai dengan indikator tersebut sehingga tidak ada data yang dapat disajikan pada IKK ini.

Urusan Statistik ada 2 indikator, kesemuanya dapat terealisasi sesuai dengan target.

Urusan Persandian ada ada 2 indikator, kesemuanya dapat terealisasi sesuai dengan target.

Untuk lebih jelas dalam Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dari tahun ke tahun dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini;

Tabel 2.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kota Bandung

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (Thn n-2)	Tahun 2024 (Thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)			3,35	3,50	4,77	4,77	3,98	4,59	4,77	4,77	IKU 2024-2026
2	Indeks Kepuasan Masyarakat			85	88,40	88,50	88,60	91.07	95,89	88,50	88,60	IKU 2024-2026
			<b>Indikator Kinerja Kunci Kota Bandung</b>									
1			Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat Kecamatan	100	100	100	100	100%	100%	100	100	
2			Cakupan Layanan Telekomunikasi	90.00	95.00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kantor BPS Kota

3			Prosentase penduduk yang menggunakan HP/telephon	92.05	93.89	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Bandung tidak lagi mendata layanan telekomunikasi
4			Proporsi rumah tangga dengan akses internet	95.03	95.22	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
5			Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	21.39	20	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
6			Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
7			Data Basis Pembangunan Daerah	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
8			Prosentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat daerah	93,75	100%	100%	100%	62,50	NA	100%	100%	

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

## **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Untuk dapat mencapai penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung masih keterkaitan dengan baik dengan tingkat provinsi atau kabupaten dan kota lain maupun tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan.

Keterkaitan ini menjadi peluang eksternal Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan kinerja pembangunan, yaitu;

1. Adanya aturan UU tentang keterbukaan informasi publik;
2. Adanya konsep smart city sebagai kebijakan pemerintah pusat;
3. Kota Bandung yang strategis sebagai pusat kegiatan pendidikan, bisnis dan pusat pemerintahan Jawa Barat;
4. Meningkatnya jumlah perangkat daerah di lingkungan Pemkot Bandung yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi serta standarisasi aplikasi di Pemkot Bandung;
5. Kemudahan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat dan Instansi Pemerintah lain;
6. Perkembangan IPTEK yang pesat, dukungan serta peran serta masyarakat yang dapat lebih mempercepat peningkatan kinerja pada era globalisasi;
7. Adanya komitmen pimpinan dan jajaran dalam penyelenggaraan program dan kegiatan.

Sedangkan tantangan atau ancaman eksternal yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan kinerja pembangunan ini, yaitu.

1. Pelaksanaan Bandung Smart City secara eksternal belum didukung maksimal;
2. Belum semua kinerja pelayanan publik sesuai harapan;
3. Belum adanya standarisasi aplikasi integrasi;
4. Tingkat literasi internet belum merata;
5. Belum optimalnya keamanan data;
6. Kemampuan Sumber Daya Manusia terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi di Perangkat Daerah masih perlu ditingkatkan.

## **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026, merupakan pedoman untuk penyusunan rancangan Renja PD. Rancangan Renja PD merupakan kebijakan Top Down Planning yaitu kebijakan yang harus mengikuti arah kebijakan dari pusat dan juga harus melaksanakan Up Down Planning yaitu harus mengadopsi usulan dari masyarakat sehingga PD nantinya menyelaraskan antara usulan dari bawah dan menyelaraskannya dengan kebijakan dari atas. Berdasarkan Perda No. 5 tahun 2009 usulan hasil Musrenbang dan reses Dewan harus bisa diakomodir minimal sebesar 30%.

Untuk lebih jelas review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kota Bandung dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini;

**Tabel 2.3**

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026  
Kota Bandung

Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>				<b>34.486.193.955</b>	<b>URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>				<b>49.633.386.057</b>
<b>A</b>	<b>URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>Bandung</b>		<b>100%</b>	<b>33.300.493.955</b>	<b>URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>Bandung</b>		<b>100%</b>	<b>47.083.386.057</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>		<b>Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>21.678.111.054</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>		<b>Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>23.072.129.427</b>
1	<b>Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	100%	-	<b>Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	100%	200.000.000
01	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	200.000.000
2	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase administrasi keuangan Perangkat Daerah</b>	100%	<b>17.622.187.997</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase administrasi keuangan Perangkat Daerah</b>	100%	17.622.187.997
02	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77 orang	17.622.187.997	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77 orang	17.622.187.997

3	<b>Kegiatan Administrasi Kpegawaiannya Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Administrasi Kpegawaiannya Perangkat Daerah</b>	100%	-	<b>Kegiatan Administrasi Kpegawaiannya Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Administrasi Kpegawaiannya Perangkat Daerah</b>	100%	190.000.000
03	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	<b>190.000.000</b>
4	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	100%	<b>868.670.815</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	100%	<b>1.564.941.430</b>
04	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kartor yang disediakan	3 Paket	68.008.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kartor yang disediakan	3 Paket	150.000.000
05	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	74.187.892	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	118.836.540
06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 paket		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 paket	219.214.890
07	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan penggandaan yang Disediakan	12 Dokumen	22.667.693	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan penggandaan yang Disediakan	12 Dokumen	76.890.000
08	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	12 laporam	126.108.960	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	12 laporam	175.000.000
09	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan fasilitas kunjungan Tamu	12 laporam	309.422.270	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan fasilitas kunjungan Tamu	12 laporam	325.000.000
10	Sub Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporam	268.276.000	Sub Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporam	500.000.000

5	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%	<b>2.187.170.923</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%	<b>1.975.000.000</b>
11	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporam	64.780.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporam	75.000.000
12	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan layanan kebersihan dan keamanan kantor	12 laporam	2.122.390.923	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan layanan kebersihan dan keamanan kantor	12 laporam	1.900.000.000
6	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%	<b>1.000.081.319</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%	<b>1.520.000.000</b>
13	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	29 Unit	905.144.100	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	29 Unit	1.100.000.000
14	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Unit	94.937.219	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Unit	220.000.000
15	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	200.000.000
II	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>		Nilai Penerapan SPBE lingkup Layanan Informasi	2,4	<b>4.879.066.700</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>		Nilai Penerapan SPBE lingkup Layanan Informasi	2,4	<b>10.350.000.000</b>
			Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	4				Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	4	

			Nilai layanan informasi masyarakat melalui radio	0,4				Nilai layanan informasi masyarakat melalui radio	0,4	
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Radio Sonata	88,50	<b>662.022.100</b>			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Radio Sonata	88,50	<b>1.200.000.000</b>
7	<b>Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kabupaten/Kota</b>		Prosentase Perangkat Daerah yang menerapkan Keterbukaan Informasi Publik	92%	<b>5.541.088.800</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kabupaten/Kota</b>		Prosentase Perangkat Daerah yang menerapkan Keterbukaan Informasi Publik	92%	<b>11.550.000.000</b>
16	Relasi Media		Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	4 Laporan	2.008.458.700	Relasi Media		Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	4 Laporan	5.000.000.000
17	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat		Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	1 Komunitas	146.608.000	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat		Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	1 Komunitas	300.000.000
18	Pelayanan Informasi Publik		Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	5 permohonan	843.000.000	Pelayanan Informasi Publik		Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	5 permohonan	1.000.000.000

19	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik		Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	3 Rekomendasi	524.000.000	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik		Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	3 Rekomendasi	1.500.000.000
20	Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	1 media	662.022.100	Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	1 media	1.200.000.000
21	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik		Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	10 dokumen	1.086.000.000	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik		Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	10 dokumen	2.000.000.000
22	Penyusunan Konten		Jumlah Konten Informasi Publik	12 konten	61.200.000	Penyusunan Konten		Jumlah Konten Informasi Publik	12 konten	150.000.000
23	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik		Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	300 orang	209.800.000	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik		Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	300 orang	400.000.000
III	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>		Nilai Penerapan SPBE lingkup Aplikasi	37,00	<b>1.085.233.300</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>		Nilai Penerapan SPBE lingkup Aplikasi	37,00	<b>1.193.756.630</b>
			Nilai Penerapan SPBE lingkup Perencanaan, Eevaluasi dan Pengembangan	22,50	<b>800.000.000</b>			Nilai Penerapan SPBE lingkup Perencanaan, Eevaluasi dan Pengembangan	22,50	<b>1.105.000.000</b>

		Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3				Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3	
		Nilai Penerapan SPBE lingkup Infrastruktur	4,50	4.196.060.801			Nilai Penerapan SPBE lingkup Infrastruktur	4,50	10.162.500.000
8	<b>Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Aplikasi Perangkat Daerah yang terintegrasi</b>	94 Aplikasi	6.081.294.101		<b>Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Aplikasi Perangkat Daerah yang terintegrasi</b>	94 Aplikasi	7.500.000.000
		Cakupan leveling Pemerintahan Digital	1				Cakupan leveling Pemerintahan Digital	1	
		Persentase keterhubungan layanan internet Perangkat Daerah	100%				Persentase keterhubungan layanan internet Perangkat Daerah	100%	
24	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	35 Aplikasi	788.900.000		Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	35 Aplikasi	4.000.000.000
25	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 dokumen	250.000.000		Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 dokumen	500.000.000
26	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	200 PD	532.160.801		Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	200 PD	3.000.000.000

27	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE		Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	5 Aplikasi	837.513.300	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE		Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	5 Aplikasi	921.264.630
28	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan		Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	4 aplikasi	247.720.000	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan		Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	4 aplikasi	272.492.000
29	Penyediaan akses internet		Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	200 PD	2.875.000.000	Penyediaan akses internet		Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	200 PD	3.162.500.000
30	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah		Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	2 Dokumen	200.000.000	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah		Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	2 Dokumen	220.000.000
31	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas		Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	2 Dokumen	350.000.000	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas		Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	2 Dokumen	385.000.000
B	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>				

IV	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>		<b>Nilai Penerapan SPBE lingkup Data dan Statistik</b>	<b>3,30</b>	800.000.000	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>		<b>Nilai Penerapan SPBE lingkup Data dan Statistik</b>	<b>3,30</b>	1.650.000.000
			Indeks Pembangunan Statistik	<b>3.04</b>				Indeks Pembangunan Statistik	<b>3.04</b>	
9	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase layanan data sektoral yang tersedia pada Portal Data sesuai dengan standar data</b>	100%	<b>800.000.000</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase layanan data sektoral yang tersedia pada Portal Data sesuai dengan standar data</b>	100%	<b>1.650.000.000</b>
32	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia		Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	100%	250.627.600	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional		Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100%	900.000.000
33	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral		Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	100%	292.952.300	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral		Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100%	400.000.000
34	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral		Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	1 dokumen	256.420.100	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia		Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 dokumen	350.000.000
C	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>				
V	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>		<b>Nilai Penerapan SPBE lingkup Data dan Statistik</b>	<b>1,20</b>	<b>385.700.000</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>		<b>Nilai Penerapan SPBE lingkup Data dan Statistik</b>	<b>1,20</b>	<b>900.000.000</b>

10	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah aplikasi yang terkendali keamanannya</b>	<b>10 Aplikasi</b>	<b>385.700.000</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah aplikasi yang terkendali keamanannya</b>	<b>10 Aplikasi</b>	<b>900.000.000</b>
35	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	10 Aplikasi	385.700.000	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	10 Aplikasi	900.000.000

Sumber : Renstra Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika 2024-2026

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Melalui kegiatan Musrenbang mulai dari Tingkat Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kota, PD akan menyerap aspirasi dari masyarakat. Usulan masyarakat sebagian besar umumnya mengajukan usulan mengenai perbaikan sarana prasarana jalan tetapi ada juga sebagian lagi yang mengusulkan kegiatan pada PD teknis yang pada garis besarnya meminta bantuan pelatihan keterampilan dan bantuan peralatan usaha.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung menanggapi usulan masyarakat terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang dan akan mengakomodir sepanjang sesuai dengan tupoksi Dinas. Usulan-usulan dari hasil Musrenbang akan ditelaah lebih lanjut dengan melakukan klarifikasi ke lokasi yang meminta bantuan bila sesuai dengan kriteria yang dimiliki Dinas maka akan ditindaklanjuti.

Berdasarkan hasil Musrenbang tingkat Kota Bandung Tahun 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika tidak ada usulan-usulan dari Musrenbang Tingkat Kecamatan.



# BAB III

## TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Seiring dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, maka Dinas Komunikasi dan Informatika dalam upaya menelaraskan tugas dan fungsi sesuai dengan urusannya.

Ada beberapa kebijakan nasional pada Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan urusannya yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika; Urusan Statistik dan Urusan Persandian.

#### A. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

##### PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL

1. Pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi informasi komunikasi (TIK) dan penyiaran melalui transformasi digital.
2. Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik dengan strategi:
  - a. Penguatan integrasi tata kelola informasi dan komunikasi public sesuai dengan asas-asas keterbukaan informasi publik.
  - b. Penguatan media-media lokal dan alternative sebagai sumber informasi utama masyarakat,
  - c. Penyediaan konten informasi publik yang berkualitas dan merata, terutama bagi masyarakat di wilayah 3T,
  - d. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia bidang komunikasi dan informasi,
  - e. Peningkatan akses partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan publik secara langsung dan digital,

- f. Peningkatan literasi media masyarakat melalui pendidikan dan pendekatan sosial budaya,
- g. Penyusunan standarisasi lembaga pers dan jurnalis,
- h. Peningkatan kualitas isi siaran TV melalui pembentukan rating nasional serta penguatan peran KPI;

#### ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. Pengembangan e-Government di lingkup Pemerintah daerah.
2. Pembinaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Daerah.
3. Pengelolaan dan Penyediaan Informasi melalui media publik dan kemitraan lembaga komunikasi di daerah.

#### TUJUAN/SASARAN

1. Kualitas akses TIK yang merata dengan pemanfaatan yang optimal.
2. Terwujudnya komunikasi publik yang efektif, integratif dan partisipatif.

Untuk mendukung kebijakan nasional, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung disesuaikan dengan program/kegiatan yang ada dengan memperhatikan acuan yang telah ditentukan dalam penyusunan RKPD Tahun 2026 sesuai amanat Permendagri Nomor 15 tahun 2025, yaitu;

1. Dalam mendukung prioritas nasional kelima yaitu stabilitas keamanan nasional guna meningkatkan akses dan kualitas informasi publik, perlu adanya upaya penatalaksanaan bidang komunikasi publik, penyediaan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, maritim, pembangunan manusia dan kebudayaan, serta pengelolaan informasi publik melalui media Pemerintah.
2. Dalam rangka pencapaian pembangunan nasional tersebut, arah dan kebijakan pembangunan daerah dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia bidang Komunikasi di Pemerintah daerah, peningkatan penyebaran informasi publik yang berkualitas melalui media cetak, media elektronik, media luar ruang, media tatap muka, pertunjukan rakyat, internet, kemitraan dengan komunitas

informasi dan komunikasi publik serta media yang dimiliki Pemerintah daerah. Dengan ini maka dalam penyusunan RKPD Tahun 2025 Pemerintah daerah perlu memperhatikan isu-isu sebagai berikut:

- a. Penyebaran informasi pencegahan stunting. Jaminan Kesehatan Nasional;
  - b. Penguatan karakter kebangsaan; dan
  - c. Deradikalisasi.
3. Dalam melaksanakan pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik, Pemerintah daerah memperhatikan:
- a. Seluruh anggaran belanja TIK di lingkungan Pemerintah daerah agar berada di satu rekening dinas yang melaksanakan urusan komunikasi dan informatika.
  - b. Infrastruktur TIK yang terintegrasi, seperti server pengolah data dan jaringan komunikasi data.
  - c. Selama belum ada kebijakan yang mengatur, pembangunan aplikasi umum di Pemerintah daerah agar menggunakan atau mengadopsi aplikasi serupa yang sudah digunakan di pusat atau daerah lain.
  - d. Integrasi data di lingkungan Pemerintah daerah di bawah koordinasi dinas yang melaksanakan urusan komunikasi dan informatika untuk dapat diakses secara berbagi pakai oleh seluruh SKPD; dan
  - e. Peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia bidang TIK di lingkungan Pemerintah daerah baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

## **B. URUSAN STATISTIK**

### **PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL**

Pembangunan Manusia. Guna Mendukung Dimensi Pembangunan Manusia, BPS telah melaksanakan Sensus Penduduk dengan fokus pembangunan: Satu data kependudukan Indonesia

### **TUJUAN/SASARAN**

Menyediakan data penduduk dan perumahan yang mencakup jumlah, distribusi, komposisi, dan karakteristiknya, serta menjadi menuju satu data kependudukan Indonesia

## C. URUSAN PERSANDIAN

### PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL

Menguatnya Stabilitas Polhukhankam dan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik Hal ini diwujudkan dengan:

1. Pembangunan dan Penguatan *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT);
2. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Keamanan Siber.

### ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pelaksanaan urusan Pemerintah daerah Bidang persandian meliputi:

1. Penyelenggaran persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Yang dilaksanakan melalui:
  - a. Penyusunan kebijakan pengamanan informasi <sup>[[[ ]]</sup><sub>SEP</sub>
  - b. Pengelolaan sumber daya <sup>[[[ ]]</sup><sub>SEP</sub>keamanan informasi<sup>[[[ ]]</sup><sub>SEP</sub>
  - c. Pengamanan sistem elektronik dan pengamanan informasi nonelektronik
  - d. Penyediaan layanan keamanan informasi

### TUJUAN/SASARAN

Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional dengan indikatornya adalah Meningkatnya skor Indonesia dalam *Global Cybersecurity Index*.

Keselarasn kinerja untuk mendukung kebijakan pembangunan nasional ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dengan beberapa program dan kegiatannya yaitu;

1. Dukungan pemerintah daerah dalam kegiatan penguatan *incident response*

*team* sektor pemerintah adalah sebagai berikut:

2. Dukungan Formasi Sumber Daya Manusia yang akan ditunjuk bertugas dalam CSIRT: khusus menjalankan fungsi CSIRT (*dedicated*); atau mendelegasikan staf yang menjadi admin TI.
3. Dukungan APBD untuk Jaldis mengikuti pelatihan, FGD, asistensi pembentukan CSIRT, dan/atau *Drill Test* di pusat. [SEP]
4. Dukungan dokumen waktu, dan tempat untuk asistensi pembentukan CSIRT sektoral di lingkungan pemerintah daerah. [SEP]
5. Dukungan ketetapan dalam Peraturan Gubernur tentang kebijakan tata kelola CSIRT, SOP operasional CSIRT, susunan tim CSIRT, dan layanan CSIRT yang [SEP] dinyatakan dalam RFC 2350, berikut dukungan anggaran operasional CSIRT dan honorarium Tim CSIRT dan lain-lain.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.**

Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informasi dalam melaksanakan sasaran dan target kinerja Renstra Perangkat Daerah berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2024-2026.

Adapun Tujuan dan Sasaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2026 memiliki target kinerja adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1**

**Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026  
Sebelum Revisi**

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	TARGET		
			2024	2025	2026
1	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE/Smart City)	B	B	B
1.1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Sangat Baik (3,50)	Sangat Baik (3,70)	Sangat Baik (4,00)
1.2	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Diskominfo	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,40	88,50	88,60

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

**Tabel 3.2**

**Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026  
Sesudah Revisi**

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASA RAN	REALISASI	TARGET	
			2024	2025	2026
1	Terciptanya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berdampak	Nilai Reformasi Birokrasi General	75,81	77	79
1.1	Terciptanya tata Kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel.	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Lingkup Kewenangan Diskominfo	4,59 (Memuaskan)	4.62 (Memuaskan)	4.65 (Memuaskan)
1.2	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Diskominfo	Indeks Kepuasan Masyarakat	95,89	95,90	95,91

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

### 3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 sebanyak; 5 program; 11 Kegiatan dan 33 Sub kegiatan, yaitu dapat di lihat pada Tabel di Bawah ini;

**Tabel 3.3  
Program dan Kegiatan serta pendanaan**

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

	<b>URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>				
<b>A</b>	<b>URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>				
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Kota Bandung</b>	-	
	<b>Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja</b>	Kota Bandung		
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bandung		
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan</b>	Kota Bandung		
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bandung	20.522.187.997	
	<b>Kegiatan Administrasi Kepagawainan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepagawainan Perangkat Daerah</b>	Kota Bandung		
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Bandung		
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum</b>	Kota Bandung		
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kartor yang disediakan	Kota Bandung	148.960.900	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Bandung	24.416.568	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan penggandaan yang Disediakan	Kota Bandung	22.975.491	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	Kota Bandung	125.973.120	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan fasilitasi kunjungan Tamu	Kota Bandung	246.975.000	
	Sub Kegiatan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bandung	261.415.000,00	
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kota Bandung		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bandung	64.470.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kota Bandung	2.081.147.792	
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kota Bandung		

	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kota Bandung	912.216.500	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kota Bandung	96.266.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Bandung		
			Kota Bandung		
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	Nilai Penerapan SPBE lingkup Layanan Informasi	Kota Bandung		
		Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	Kota Bandung		
		Nilai layanan informasi masyarakat melalui radio	Kota Bandung		
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Radio Sonata	Kota Bandung		
	<b>Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kabupaten/Kota</b>	Prosentase Perangkat Daerah yang menerapkan Keterbukaan Informasi Publik	Kota Bandung		
	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Kota Bandung	1.800.000.000	
	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Kota Bandung	146.608.000	
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Kota Bandung	843.000.000	
	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Kota Bandung	524.000.000	
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Kota Bandung	862.022.100	
	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	Kota Bandung	1.086.000.000	
	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Kota Bandung	61.200.000	

	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Kota Bandung	30.733.300	
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	Nilai Penerapan SPBE lingkup Aplikasi	Kota Bandung		
		Nilai Penerapan SPBE lingkup Perencanaan, Evalueasi dan Pengembangan	Kota Bandung		
		Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kota Bandung		
		Nilai Penerapan SPBE lingkup Infrastruktur	Kota Bandung		
	<b>Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Aplikasi Perangkat Daerah yang terintegrasi</b>	Kota Bandung		
		<b>Cakupan leveling Pemerintahan Digital</b>	Kota Bandung		
		<b>Prosentase keterhubungan layanan internet Perangkat Daerah</b>	Kota Bandung		
	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	Kota Bandung	700.900.000	
	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Kota Bandung	251.525.400	
	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kota Bandung	502.160.801	
	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	Kota Bandung	837.513.300	
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Kota Bandung	207.719.000	
	Penyediaan akses internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Kota Bandung	1.875.000.000	

	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Kota Bandung	200.000.000	
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Kota Bandung	300.000.000	
<b>B</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>				
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Nilai Penerapan SPBE lingkup Data dan Statistik</b>	Kota Bandung		
		<b>Indeks Pembangunan Statistik</b>	Kota Bandung		
	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase layanan data sektoral yang tersedia pada Portal Data sesuai dengan standar data	Kota Bandung		
	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	Kota Bandung	200.627.600	
	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	Kota Bandung	242.952.300	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Kota Bandung	206.420.100	
<b>C</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>				
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Nilai Penerapan SPBE lingkup Persandian</b>	Kota Bandung		
	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah aplikasi yang terkendali keamanannya	Kota Bandung		
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian		335.700.000	
	<b>JUMLAH</b>			<b>35.721.086.269</b>	

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika



## BAB IV

# RENCANA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja Tahun 2026 dan pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2024-2026, namun pada Tahun 2026 ini ada penyelarasan nomenklatur dari Kementerian Dalam Negeri pada sub kegiatan yaitu;

### **I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;  
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
  - a Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - b.Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
  - c.Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - d.Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
  - e.Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu;
  - f. Sub Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sum Daya Air dan Listrik;
  - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- b. Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan;
  - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya.

## **II. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**

1. Kegiatan Penyampaian Komunikasi dan Informasi Publik
  - a. Sub Kegiatan Relasi Media;
  - b. Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat;
  - c. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik;
  - d. Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik;
  - e. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
  - f. Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Komunikasi Publik;
  - g. Sub Kegiatan Penyusunan Konten;
  - h. Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik.

## **III. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**

1. Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - a. Sub Kegiatan Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional;
  - b. Sub Kegiatan Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE;
  - c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota;
  - d. Sub Kegiatan Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE;
  - e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan
  - f. Sub Kegiatan Penyediaan akses internet
  - g. Sub Kegiatan Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
  - h. Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas.

## **IV. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**

1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;
  - a. Sub Kegiatan Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia ;
  - b. Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral;
  - c. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral.

## **V. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**

1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah.

Sebagai rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2026 dan prakiraan maju Tahun 2027, maka dapat di lihat pada Tabel 5 di bawah ini;

Tabel 4.1  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026  
dan Prakiraan Maju Tahun 2027  
Kota Bandung

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Pagu Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2					URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								
2	16				URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Bandung	100%	-	APBD		100%	
2	16	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	Kota Bandung	100%		APBD		100%	
2	16	01	2.01	07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bandung	1 Laporan		APBD		1 Laporan	200.000.000
2	16	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan	Kota Bandung	100%		APBD		100%	
2	16	01	2.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bandung	77 orang	20.522.187.997	APBD		77 orang	22.574.406.797

2	16	01	2.05		<b>Kegiatan Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah</b>	Kota Bandung	100%		APBD		100%	
2	16	01	2.05	02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Bandung	1 paket		APBD		1 paket	190.000.000
2	16	01	2.06		<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum</b>	Kota Bandung	100%		APBD		100%	
2	16	01	2.06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kartor yang disediakan	Kota Bandung	3 Paket	148.960.900	APBD		Paket	163.856.990
2	16	01	2.06	03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Bandung	3 Paket	24.416.568	APBD		3 Paket	26.858.225
2	16	00	2.06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan penggandaan yang Disediakan	Kota Bandung	2 paket	22.975.491	APBD		2 paket	25.273.040
2	16	01	2.06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	Kota Bandung	12 Dokumen	125.973.120	APBD		12 Dokumen	138.570.432
2	16	01	2.06	08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan fasilitasi kunjungan Tamu	Kota Bandung	12 laporam	246.975.000	APBD		12 laporam	271.672.500
2	16	01	2.06	09	Sub Kegiatan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bandung	12 laporam	261.415.000,00	APBD		12 laporam	287.556.500
2	16	01	2.08		<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kota Bandung	100%		APBD		100%	
2	16	01	2.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bandung	12 laporam	64.470.000	APBD		12 laporam	70.917.000
2	16	01	2.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kota Bandung	12 laporam	2.081.147.792	APBD		12 laporam	2.289.262.571

2	16	01	2.09		<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kota Bandung	100%		APBD		100%	
2	16	01	2.09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	Kota Bandung	29 Unit	912.216.500	APBD		29 Unit	1.003.438.150
2	16	01	2.09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kota Bandung	204 Unit	96.266.000	APBD		12 laporam	105.892.600
2	16	01	2.09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Bandung	1 unit		APBD		1 Unit	-
							Kota Bandung			APBD			
2	16	02			<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	Nilai Penerapan SPBE lingkup Layanan Informasi	Kota Bandung	3,0		APBD		3,0	
						Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	Kota Bandung	4		APBD		4	
						Nilai layanan informasi masyarakat melalui radio	Kota Bandung	0,4		APBD		0,4	
						Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Radio Sonata	Kota Bandung	88,60		APBD		88,70	
2	16	02	2.01		<b>Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota</b>	Prosentase Perangkat Daerah yang menerapkan Keterbukaan Informasi Publik	Kota Bandung	93%		APBD		94%	
2	16	02	2.01	0014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif	Kota Bandung	4 Laporan	1.800.000.000	APBD		4 Laporan	1.980.000.000



						Nilai Penerapan SPBE lingkup Infrastruktur	Kota Bandung	10,00		APBD		10,00	
2	16	03	2.01		<b>Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Aplikasi Perangkat Daerah yang terintegrasi</b>	Kota Bandung	114 Aplikasi		APBD		118 Aplikasi	
						Cakupan leveling Pemerintahan Digital		2				3	
						Prosentase keterhubungan layanan internet Perangkat Daerah		100				100	
2	16	03	2.02	13	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	Kota Bandung	35 Aplikasi	700.900.000	APBD		35 Aplikasi	4.000.000.000
2	16	03	2.02	19	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Kota Bandung	1 dokumen	251.525.400	APBD		1 dokumen	500.000.000
2	16	03	2.02	24	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kota Bandung	200 PD	502.160.801	APBD		200 PD	3.000.000.000
2	16	03	2.02	32	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	Kota Bandung	5 Aplikasi	837.513.300	APBD		5 Aplikasi	1.000.000.000
2	16	03	2.02	34	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Kota Bandung	4 aplikasi	207.719.000	APBD		4 aplikasi	500.000.000

2	16	03	2.02	36	Penyediaan akses internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Kota Bandung	200 PD	1.875.000.000	APBD	200 PD	3.000.000.000
2	16	03	2.02	37	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Kota Bandung	2 Dokumen	200.000.000	APBD	2 Dokumen	300.000.000
2	16	03	2.02	38	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Kota Bandung	2 Dokumen	300.000.000	APBD	2 Dokumen	500.000.000
2	20				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>					APBD		
2	20	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Nilai Penerapan SPBE lingkup Data dan Statistik</b>	Kota Bandung	<b>5,80</b>		APBD	<b>5,80</b>	
						<b>Indeks Pembangunan Statistik</b>		<b>3,05</b>			<b>3,06</b>	
2	20	02	2.01		<b>Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Persentase layanan data sektoral yang tersedia pada Portal Data sesuai dengan standar data	Kota Bandung	100%		APBD	100%	
2	20	02	2.01	0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	Kota Bandung	100%	200.627.600	APBD	100%	4.000.000.000

				0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	Kota Bandung	100%	242.952.300	APBD		100%	500.000.000
2	20	02	2.01	0020	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Kota Bandung	30 Orang	206.420.100	APBD		30 orang	3.000.000.000
2	21				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>					APBD			
2	21	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Nilai Penerapan SPBE lingkup Data dan Statistik</b>	Kota Bandung	<b>3,70</b>		APBD		<b>3,70</b>	
2	21	02	2.01		<b>Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Jumlah aplikasi yang terkendali keamanannya	Kota Bandung	<b>7 Aplikasi</b>		APBD		<b>7 Aplikasi</b>	
2	21	02	2.01	0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian		7 Perangkat Daerah	335.700.000	APBD		7 Perangkat Daerah	900.000.000
					<b>JUMLAH</b>				<b>35.721.086.269</b>				<b>53.536.624.545</b>

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

Untuk mencapai rencana dan tujuan diperlukan mitra kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, dalam mendukung pelayanan, kinerja maupun data pendukung dari berbagai perangkat daerah yang ada di lingkungan Kota Bandung.

#### Data Mitra Perangkat Daerah Dalam Mendukung Kinerja Diskominfo

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KRITERIA DIINTERVENSI	MITRA PERANGKAT DAERAH	URAIAN
1	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Prosentase Pelaksanaan Kebijakan SPBE	Bapperida Inspektorat Bagian Hukum	Tersedianya dokumen SPBE
		Aspek Tata Kelola SPBE	Bapperida, Inspektorat, BKAD, BKPSDM, DPMPTS P, DISDUKCAPIL, Bag. Organisasi, Bag. Pengadaan	Tersedianya dokumen SPBE
		Aspek Manajemen SPBE	Bapperida, Inspektorat, BKAD, BKPSDM, Disarpus, Bag. Organisasi, Bag. Balap	Tersedianya dokumen SPBE
		Aspek Layanan SPBE	Disdukcapil, DPMPTSP, Disnaker, Bag. Hukum	Tersedianya dokumen SPBE
2	Indeks Kepuasan Masyarakat PD	Layanan dinas ke masyarakat	Bagian Organisasi	Tersedianya dokumen IKM

Sedangkan mitra kerja PD selain mendukung Indikator Kinerja Utama juga mendukung kinerja layanan kepada masyarakat, yaitu;

NO	LEMBAGA/ KEMENTERIAN/ PD/ ORGANISASI	URAIAN	KETERANGAN

1	Kementerian Komunikasi dan Informatika RI	Evaluasi dan penilaian Smart City;	Nilai Smart City
2	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI	Evaluasi dan penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai SPBE
3	Badan Siberi dan Sandi Nasional (BSSN)	Pelatihan keamanan data dan sertifikasi keamanan informasi	Sertifikasi
4	BPS Kota Bandung	Data Bandung satu Data	
5	Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Kerjasama sosialisasi kepada masyarakat	Sosialisasi di tingkat kelurahan
6	Relawan TIK (RTIK)	Sosialisasi di kalangan pelajar dan mahasiswa serta generasi muda	
7	Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung	Bandung Open Data, Keterbukaan Informasi Publik, Layanan Aspirasi Online Rakyat (LAPOR) dan sebagainya.	



## BAB IV PENUTUP

**R**encana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2026 merupakan bentuk penjabaran tahunan dari Rencana Strategis 2025 – 2029 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung khususnya Urusan Komunikasi dan Informatika dan memantapkan tatakelola pemerintah daerah yang baik. Rencana Kerja ini disusun untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis beserta target yang ingin dicapai.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2026 disusun dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun pengawasan program/ kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis.

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya masih harus sering dievaluasi. Diharapkan dengan evaluasi yang terus berjalan secara sistematis. Seluruh jajaran Diskominfo dapat menunjukkan kinerja yang memuaskan dan meyakinkan

masyarakat bahwa keberadaan Diskominfo Kota Bandung merupakan aset yang berharga bagi terlaksananya otonomi daerah.

Dengan telah tersusunnya Rencana Kerja Tahunan ini maka Diskominfo Kota Bandung harus segera melakukan peningkatan kualitas SDM bidang Informasi dan Komunikasi karena Dinas Komunikasi dan Komunikasi merupakan pintu gerbang Informasi Pemerintah Kota Bandung dengan senantiasa menyediakan Informasi yang dibutuhkan masyarakat baik yang berskala lokal, regional dan nasional juga sebagai Dinas yang menjalin Komunikasi timbak balik yang seimbang, aspiratif dan efektif sesuai dengan paradigma baru yang ada.

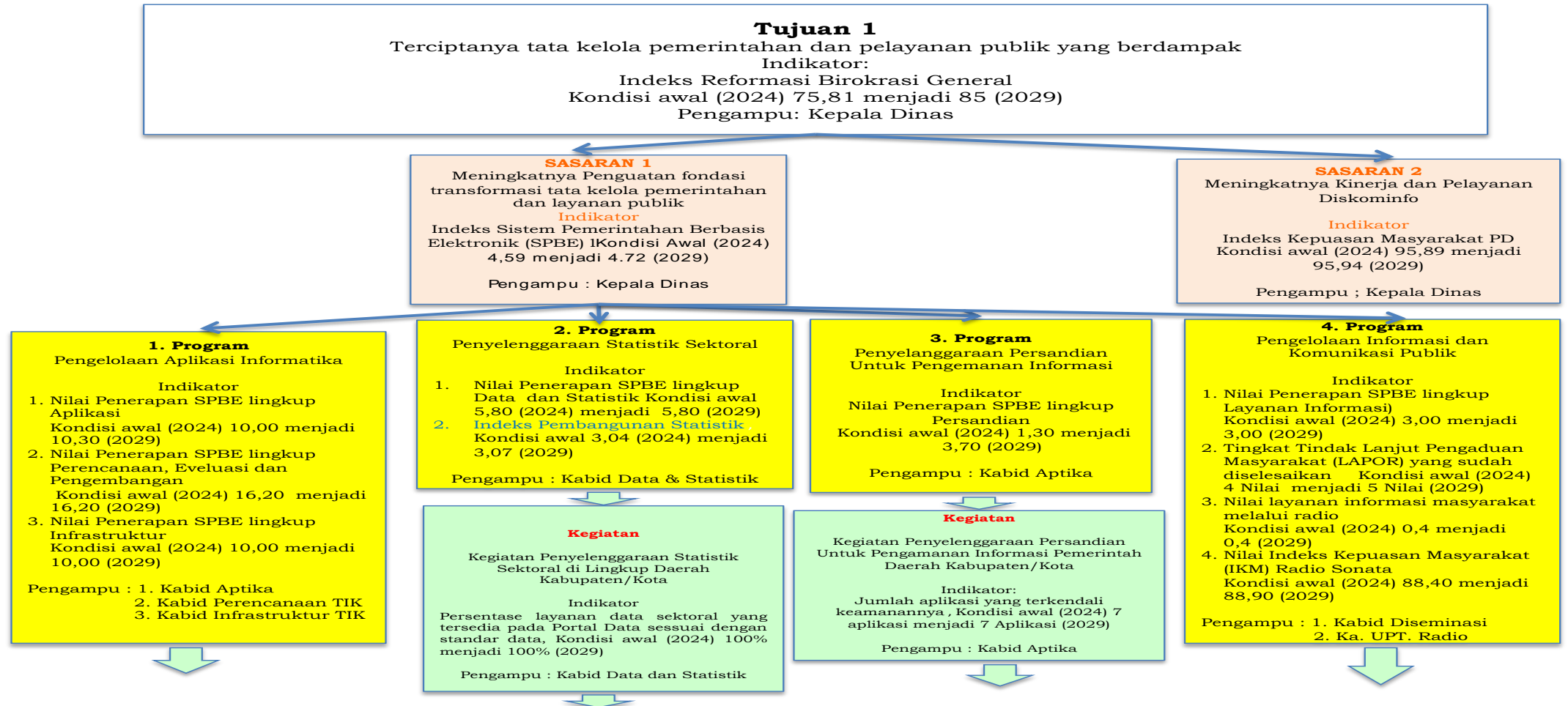
Adanya Rencana Kerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat memacu kinerja aparat sehingga tercipta hasil kerja yang optimal dan dapat dipertanggung jawabkan.

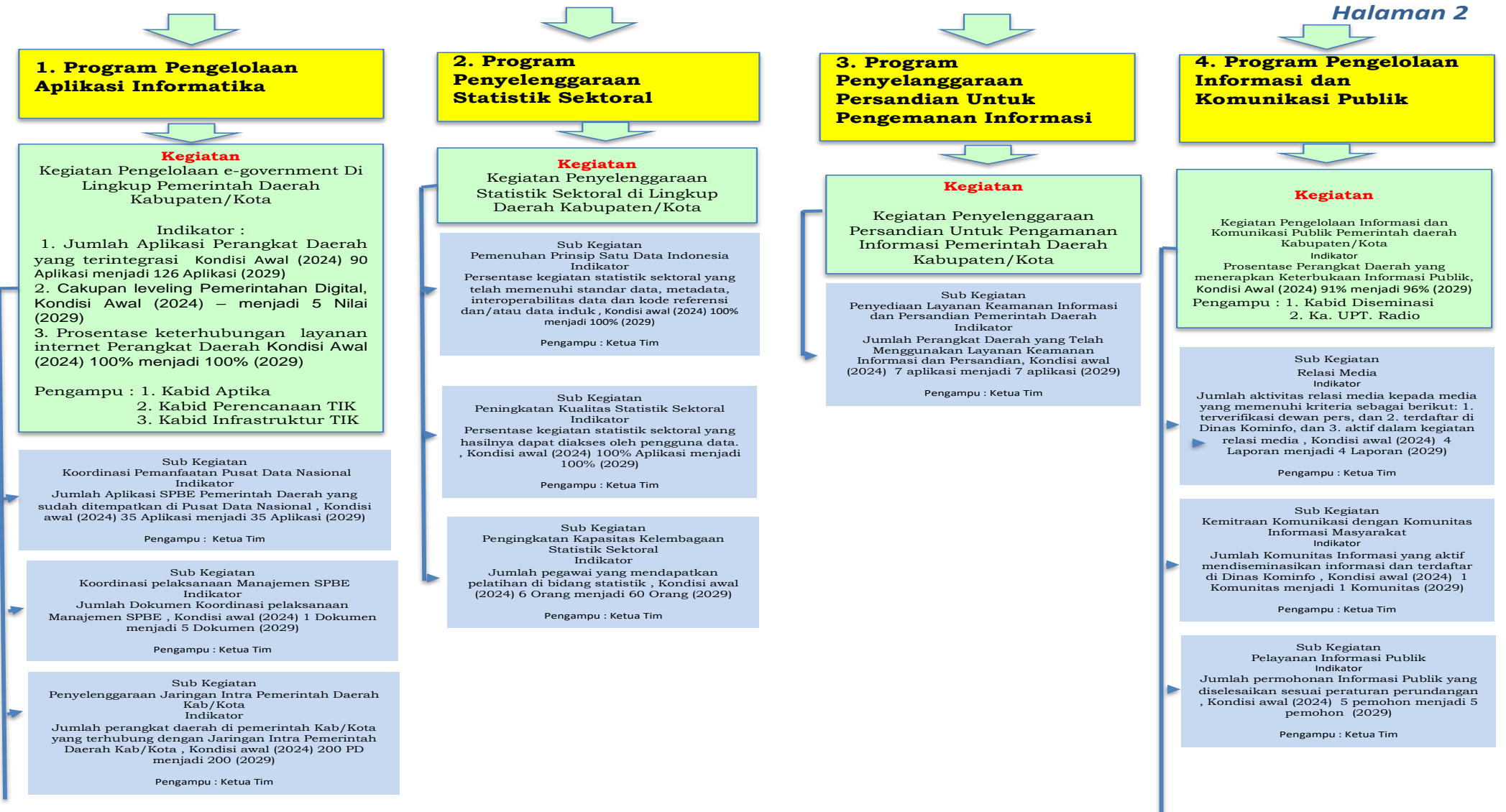
Bandung, 17 September 2025

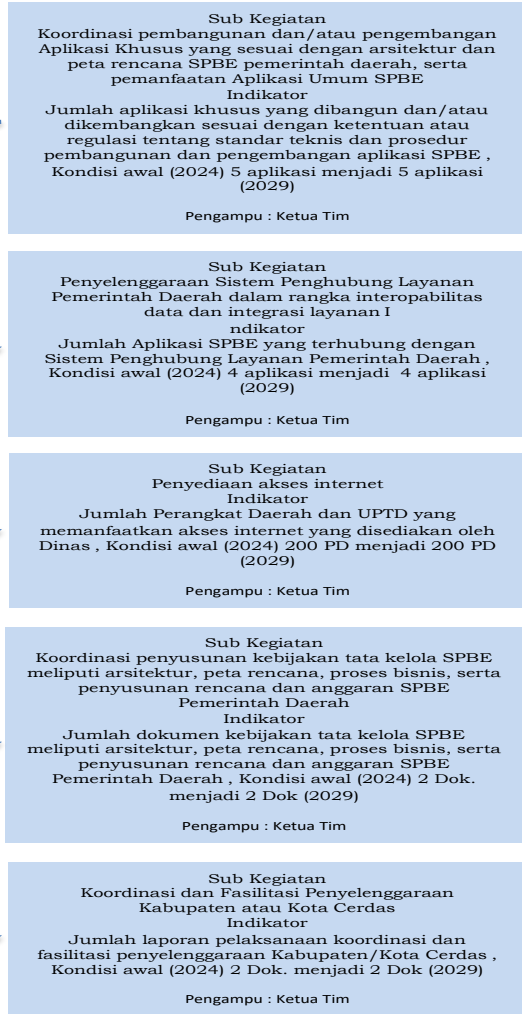
  
**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**(YAYAN AHMAD BRILYANA, S.Sos.M.Si)**  
Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 197311271993031003

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Pohon Kinerja 2025-2029 Pelaksanaan Program Diskominfo Kota Bandung







**SASARAN 2**  
Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Diskominfo  
**Indikator**  
Indeks Kepuasan Masyarakat PD  
Kondisi awal (2024) 95,89 menjadi 95,94 (2029)  
Pengampu : Kepala Dinas

**5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**  
**Indikator**  
Persentase pelayanan administrasi perkantoran Kondisi awal (2024) 100% menjadi 100% (2029)  
Pengampu : Sekretaris Daerah

**1. Kegiatan**  
Kegiatan egiatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
**Sub Kegiatan**  
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

**2. Kegiatan**  
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
**Sub Kegiatan**  
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

**3. Kegiatan**  
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
**Sub Kegiatan**  
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

**4. Kegiatan**  
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah  
**Sub Kegiatan**  
1. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
2. Dst..

# CROSSCUTTING TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

